

BAB 1

PENDAHULUAN

Saat ini isu keberlanjutan menjadi perhatian disetiap perusahaan, termasuk di perbankan. Hal ini dipicu karena perusahaan sudah tidak hanya dituntut untuk mencapai keuntungan saja, namun juga didorong berkomitmen pada tujuan keberlanjutan dengan memasukkan inisiatif baik dan bersih dalam praktik bisnisnya (Jan et al., 2021; Kouaib et al., 2020). Pada era *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 ini, organisasi dituntut oleh *stakeholders* untuk meningkatkan kesadaran dalam menjalankan tanggung jawabnya termasuk dalam menangani pemanasan global dan hak asasi manusia yang sudah menjadi permasalahan global (Tjahjadi et al., 2021). Pengungkapan *sustainability performance* tentu dinilai menguntungkan karena perusahaan akan memiliki peluang bisnis baru serta mampu memperkuat hubungan dengan para *stakeholders* (Merino et al., 2020; Naciti, 2019). *Sustainability performance* mencerminkan kinerja perusahaan dalam berbagai dimensi. Hal ini dapat dilihat pada konsep pengukuran keberlanjutan melalui pengelolaan tiga aspek secara simultan yaitu *profit (economic)*, *people (social)*, dan *planet (environmental)* atau yang dikenal dengan pendekatan *Triple Bottom Line* (Elkington, 1998). Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi kinerja keberlanjutan sehingga mengharuskan perusahaan melakukan pengungkapan keberlanjutan dalam kebijakan dan strategi internal bisnisnya demi menciptakan kinerja organisasi yang lebih baik.

Faktor yang mampu mendorong kinerja keberlanjutan salah satunya yaitu penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau disebut *Good Corporate Governance* (GCG). Perusahaan dianggap penting untuk menata sistem tata kelola yang telah ditugaskan untuk menetapkan dan menerapkan kebijakan serta strategi terkait *corporate sustainability* (Marrewijk, 2003; Naciti, 2019). Tata kelola mendefinisikan fungsi, struktur, dan peran dewan yang terlibat dalam operasi perusahaan (Campbell, 2007). Ada perbedaan sistem GCG yang dianut oleh setiap negara, yaitu sistem *one tier* dan sistem *two tier*. GCG dengan sistem *one tier* menggabungkan peran pelaksana dan pengawas yang dijalankan oleh satu organ

yaitu *Board of Directors* (BoD), sedangkan dalam sistem *two tier* terdapat pemisahan antara peran pelaksana pengelola perusahaan yang dijalankan oleh dewan direksi dengan peran pengawas yang dijalankan oleh dewan komisaris (Pellegrini et al., 2016; Tjahjadi et al., 2021). Indonesia sampai saat ini menganut sistem *two tier*. Pellegrini et al. (2016) menjelaskan bahwa dengan adanya pemisahan peran antara dewan direksi dan komisaris mampu meningkatkan transparansi pengambilan keputusan serta meningkatkan kualitas dalam pengawasan. GCG dapat berperan dalam meningkatkan kepercayaan *stakeholders* terhadap kinerja keberlanjutan perusahaan (Hussain et al., 2018). Terkait hal tersebut, teori *sustainability* menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan *stakeholders* dengan menyeimbangkan tiga dimensi keberlanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan (Chang et al., 2017). Perusahaan dengan tujuan keberlanjutan jangka panjang dituntut untuk menciptakan nilai ekonomi dengan mengurangi berbagai permasalahan sosial dan lingkungan (Cancela et al., 2020). Tujuan keberlanjutan ini melibatkan seluruh anggota yang ada dalam tata kelola perusahaan. Teori *agency* (Jensen & Meckling, 1976) digunakan sebagai perspektif yang dapat menjelaskan hubungan antara tata kelola dengan kinerja keberlanjutan perusahaan. Teori ini mendefinisikan hubungan yang saling bertentangan antara *agents* dengan *stakeholders* karena asumsi adanya asimetri informasi, serta konflik kepentingan antara *principal* dengan *agents* (Chams & García-Blandón, 2019; Crifo et al., 2019; Nizam et al., 2019). Teori *agency* melandasi penerapan GCG yang efektif guna meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi tantangan dan mengurangi konflik keagenan (Hussain et al., 2018; Tjahjadi et al., 2021).

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh karakteristik dewan direksi sebagai dimensi GCG terhadap *sustainability performance* masih belum memperoleh hasil yang konsisten. Beberapa peneliti membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif antara karakteristik dewan direksi terhadap *sustainability performance* (Hu & Loh, 2018; Ong & Djajadikerta, 2020; Sar, 2018; Senjaya et al., 2020; Shahzad et al., 2020). Namun, beberapa peneliti lainnya memberikan

bukti bahwa karakteristik dewan direksi tidak sepenuhnya berpengaruh terhadap *sustainability performance* tergantung dimensi yang digunakan kedua variabel (Cancela et al., 2020; Crifo et al., 2019; Hussain et al., 2018; Naciti, 2019; Tacheva et al., 2020). Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa penelitian lebih lanjut terkait hubungan keduanya masih perlu dilakukan. Oleh karena itu, *intellectual capital* dilibatkan sebagai variabel mediasi dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan lebih lanjut pengaruh karakteristik dewan direksi terhadap *sustainability performance*.

Intellectual capital dianggap sebagai sumber daya yang dapat menciptakan kekayaan bagi organisasi karena meningkatkan inovasi kinerja (Barrena-Martínez et al., 2020; Bini et al., 2016; Martin, 2004). *Intellectual capital* yang terdiri dari komponen *human capital*, *structural capital*, dan *relational capital* (Andriessen, 2004; Edvinsson & Malone, 1997; Tjahjadi et al., 2019) memungkinkan sebuah perusahaan menghasilkan nilai tambah (Laghi et al., 2020). Efisiensi *intellectual capital* sangat penting dalam menciptakan nilai dan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi perusahaan (Dalwai & Mohammadi, 2020; Pulic, 2004; Youndt et al., 2004). *Intellectual capital* diusulkan menjadi variabel mediasi karena alasan berikut: (1) terdapat penelitian terdahulu mengenai pengaruh karakteristik dewan direksi terhadap *intellectual capital* (Dalwai & Mohammadi, 2020; Kamath, 2019; Nadeem et al., 2019; Tejedo-Romero et al., 2017); (2) terdapat penelitian terdahulu mengenai pengaruh *intellectual capital* terhadap *sustainability performance* (Malik et al., 2020; Minoja & Romano, 2021; Xu et al., 2020; Yusoff et al., 2019).

Penelitian ini melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya dengan beberapa keterbaruan yaitu: (1) menambahkan *intellectual capital* sebagai variabel mediasi sehingga model penelitian yang digunakan lebih komprehensif; (2) penelitian ini berfokus pada *sustainability performance* yang jarang digunakan untuk penelitian di industri jasa keuangan Indonesia, khususnya industri perbankan; (3) menggunakan sampel data terbaru dari laporan tahunan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode lima tahun dari tahun 2016 hingga 2020.

Industri perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan. Perbankan berkontribusi dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi serta menghasilkan banyak potensi manfaat bagi kemakmuran masyarakat (Jan et al., 2019, 2021; Nizam et al., 2019). Bank memfasilitasi arus masuk asing dari berbagai sumber internasional yang pada akhirnya berperan dalam pertumbuhan ekonomi (Tahir et al., 2019). Jan et al. (2019) membuktikan dalam penelitiannya bahwa peran tata kelola pada bank syariah maupun konvensional mampu mendorong pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan pada industri perbankan di Indonesia dengan beberapa alasan berikut: (1) Indonesia dijadikan sampel dalam penelitian karena memiliki isu terkait masalah ekonomi, sosial, maupun lingkungan; (2) industri jasa keuangan, khususnya perbankan berperan aktif dalam mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan OJK No 51/POJK.03/2017. Menurut POJK tersebut, bank di Indonesia berperan dalam mempertimbangkan efektivitas risiko manajemen lingkungan dan sosial melalui dukungan pendanaan suatu proyek industri dengan melihat sejauh mana proyek atau bisnis tersebut berkontribusi dalam *greener business*, *socially inclusive*, dan *climate friendly* sehingga menuju arah berkelanjutan (OJK, 2017); (3) bank *go public* dipilih karena emiten atau perusahaan publik wajib memberi pertanggungjawaban kepada *stakeholders* maupun *shareholders* sesuai dengan Peraturan OJK No 29/POJK.04/2016 (OJK, 2016); (4) perbankan di Indonesia harus mampu bersaing dalam menciptakan kinerja perusahaan yang terbaik (Rosita et al., 2020); (5) perbankan di Indonesia merupakan sektor yang paling intensif menggunakan *intellectual capital* (Soewarno & Tjahjadi, 2020); (6) perbankan di Indonesia berperan dalam pembuatan sistem dan kebijakan yang mendorong perekonomian berkelanjutan (Cahyadi, 2021; Victorian, 2021).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk tujuan berikut: (1) menganalisis dan membuktikan pengaruh karakteristik dewan direksi terhadap *sustainability performance*; (2) menganalisis dan membuktikan pengaruh karakteristik dewan direksi terhadap *intellectual capital*; (3) menganalisis dan membuktikan pengaruh *intellectual capital* terhadap *sustainability*

performance; (4) menganalisis dan membuktikan peran mediasi *intellectual capital* pada pengaruh karakteristik dewan direksi terhadap *sustainability performance*.

Kontribusi teoritis dari penelitian ini adalah berupa bukti empiris pada pengembangan teori *sustainability* dan teori *agency* mengenai pengaruh karakteristik dewan direksi terhadap *sustainability performance* perbankan di Indonesia yang dimediasi oleh *intellectual capital*. Secara praktis, penelitian ini berkontribusi dalam memberikan informasi bagi perbankan mengenai pentingnya peran tata kelola yang didefinisikan melalui karakteristik dewan direksi serta pentingnya investasi pada *intellectual capital* dalam meningkatkan *sustainability performance* industri perbankan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan oleh *stakeholders* dalam pertimbangan pengambilan keputusan.